

EFEKTIVITAS ORGANISASI DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TELAGA MURNI KABUPATEN BEKASI

Alridha Nurdianti¹, Kariena Febriantin², Rahman³

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: 1910631180140@student.unsika.ac.id

Abstrak

Pembangunan infrastruktur pada desa diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat, diperlukan dukungan dari masyarakat untuk mendukung program pembangunan pemerintah dan ikut serta dalam menjaga infrastuktur yang tersedia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa masalah seperti pembangunan yang terkendala oleh dana dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas peran organisasi desa Telaga Murni dalam pembangunan infrastruktur. Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas organisasi desa serta studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Urusan Perencanaan, Sekretaris Desa, dan Masyarakat Desa Telaga Murni. Hasil wawancara dan data yang diperoleh tersebut dianalisa melaui metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata kunci: Efektivitas, Pemerintah Desa, Pembangunan, Infrastruktur

Abstract

Infrastructure development in the village requires cooperation between the government and the community. The government has the authority to manage the interests of the community, support from the community is needed to support government development programs and participate in maintaining the available infrastructure. This research is motivated by several problems such as development that is constrained by funds and the lack of community participation in maintaining infrastructure. The aim of this research is to know and understand the effectiveness of the role of Telaga Murni village organization in infrastructure development. Data were collected through a process of direct interviews with informants using interview guidelines, direct observation of the activities of village organizations and documentation studies. The informants in this study were the Head of Planning Affairs, the Village Secretary, and the Telaga Murni Village Community. The results of the interviews and the data obtained were analyzed through a descriptive method using a qualitative approach.

Keywords: Effectiveness, Village Government, Development, Infrastructure

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu pulau terbesar di dunia dan juga negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbesar, sehingga Indonesia memiliki banyak masalah sosial seperti kemiskinan dan kurangnya infrastruktur. Infrastruktur dapat dikatakan sebagai salah satu sarana yang sangat penting dan dibutuhkan terhadap pembangunan suatu wilayah seperti perkotaan ataupun pedesaan (Agustina dkk., 2022). Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Perkembangan yang terlambat dalam pembangunan Infrastruktur tidak hanya terlihat dari penundaan yang signifikan dalam proyek, tapi juga dapat dirasakan langsung dari kondisi jalan yang rusak, seretnya pengadaan air bersih dan buruk kondisiprasarana umum (Rumegang dkk., 2021).

Pembangunan haruslah memperluas kebebasan yang dinikmati semua lapisan masyarakat dalam berbagai aspek seperti pembangunan dalam aspek ekonomi, yaitu kebebasan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan dan perawatan serta hak-hak politik dan sipil (misalnya, kebebasan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan pengawasan) termasuk kemudahan masyarakat dalam pencapaian akses pelayanan dasar yang dicapai melalui pembangunan infrastruktur. Permasalahan mengenai pembangunan infrastruktur telah menjadi masalah yang terus menerus dihadapi oleh suatu negara terutama dalam tingkatkan pemerintahan terkecil seperti daerah-daerah pedesaan.(Silvianis, 2015).

Pembangunan desa sangat penting karena memiliki peran dalam kerangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang dimana terdapat unsur pemerataan pembangunan yang berkaitan langsung dengan masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan orang desa. Desa mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban terhadap mengelola rumah tangga sendiri atau bisa disebut otonomi daerah. Pembangunan infrastruktur jalan cukup penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah apabila memiliki infrastruktur jalan yang baik, maka perekonomiannya dapat mengalami peningkatan, namun apabila daerah tersebut kebutuhan infrastruktur nya kurang baik maka perekonomian daerahnya dapat mengalami penurunan (Ferdian & Reski, 2020). Menurut Darmawansyah, R. (2017) (1999) hal tersebut akan meningkatkan kemampuan serta memperluasluaskan segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat salah satunya didapati melalui pembangunan infrastruktur, adanya permasalahan mengenai hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan terkait terjaminnya kesejahteraan masyarakat seperti yang ada dalam pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan bahwa “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Menurut Ramadhan dan Priyanti (2022) perkembangan otonomi daerah yang hadir untuk memberikan hak daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat juga kurang bisa mengurangi permasalahan ini. Dalam menangani permasalahan terkait infrastruktur perlu melihat kebutuhan atau ketepatgunaan untuk masyarakat, artinya melihat apakah pembangunan infrastruktur tersebut sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat (Rosita, 2016). Menurut Widjaja (2003:169) pemerintah perlu meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Efektivitas organisasi sendiri menurut Richard M. Steers memiliki ukuran efektivitas, yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Berdasarkan pola pemikiran (konsep) tersebut, organisasi desa memiliki peran dalam proses pembangunan infrastruktur di daerahnya. Di mana organisasi desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Jika organisasi desa berjalan baik dengan memiliki perencanaan pembangunan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka permasalahan akan pembangunan infrastruktur di suatu desa tersebut dapat ditanggulangi (Silvianis, 2015).

Desa Telaga Murni merupakan desa yang terletak di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Desa ini menjadi salah satu desa yang mengalami permasalahan pembangunan terutama dalam infrastrukturnya, permasalahan tersebut diungkapkan oleh Kepala Urusan Perencanaan Desa Telaga Murni yaitu Bapak Drs. Suwandi. Hal ini dikarenakan terkendala akibat dari kurangnya dana dan infrastruktur yang sudah ada juga tidak terjaga dengan baik karena partisipasi dari masyarakatnya sangat kurang dalam menjaga infrastruktur yang sudah tersedia. Selain itu jika dilihat dari sarana dan prasarana pendukung yang ada di Desa Telaga murni juga bisa dikatakan masih kurang. Dengan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas organisasi desa dalam pembangunan infrastruktur di desa tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian mengenai “Efektivitas Organisasi Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Telaga Murni Kabupaten Bekasi”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pada pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) penelitian kualitatif merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi berdasarkan tradisi metodologi investigasi yang berbeda dan mengesplorasi mengenai masalah sosial atau manusia (Yusuf, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisa bagaimana efektivitas organisasi desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Telaga Murni Kabupaten Bekasi. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sekunder, yang mana penelitian dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Tujuan Organisasi Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Telaga Murni

Pencapaian tujuan organisasi dapat dikatakan sebagai suatu hasil akhir yang akan dicapai oleh sekelompok orang. Dalam pencapaian tujuan organisasi diperlukan perencanaan pembangunan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan dengan tepat, melalui berbagai macam urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perencanaan dalam pembangunan perlu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur pemegang kepentingan didalamnya termasuk pada aspek pengawasan.

Perencanaan pembangunan di Desa Telaga Murni dilakukan melalui musyawarah, terdapat perencanaan tahunan yang biasa disebut RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa), selain itu terdapat perencanaan 6 tahun yang biasa disebut RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Prosedurnya berasal dari masing-masing dusun, dengan mengadakan musyawarah dusun (Musdus) yang diambil dari aspirasi masyarakat melalui RT, RW, dan BPD. Semua usulan dari masyarakat melalui RT, RW, dan BPD disampaikan dan diberikan melalui musyawarah desa (Musdes), setelah diadakannya musyawarah dusun maka hasil musyawarah akan dibawa ke desa melalui musyawarah desa. Kemudian dilakukan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang diadakan setiap tahun, anggarannya berasal dari pemerintah Kabupaten, Provinsi, atau Pusat (BPN). Setelah itu dilakukan Musrenbang Kecamatan dan yang terakhir dilakukan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Telaga Murni melibatkan seluruh pemegang kepentingan desa yaitu masyarakat, RT, RW, semua aparatur pemerintah, karang taruna, dan BKK yang dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang desa sebagai forum musyawarah tahunan para pemegang kepentingan desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa ini dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes).

Pelaksanaan pembangunan diukur bersadarkan pencapaian target dari perencanaan pembangunan. Desa ini salah satunya sudah membangun lapangan olahraga, sehingga manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan pembangunan di desa ini dengan adanya lapangan olahraga yaitu untuk memelihara kesehatan masyarakat, fasilitas ini terbuka untuk semua masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan diketahui bahwa sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, dan air bersih, sudah cukup memadai meskipun sarana yang sudah ada memang kurang terjaga akibat dari kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menjaga sarana tersebut. Bukti dari sarana pendidikan sudah memadai yaitu terdapat Paud, TK, SD, SMP, SMK, hingga Perguruan Tinggi Swasta di desa ini. Untuk kesehatan yang diperoleh oleh masyarakat yaitu melalui kegiatan posyandu untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil, terdapat juga puskesmas di desa ini namun belum memiliki klinik desa sehingga baru direncanakan untuk membangun klinik desa. Infrastruktur jalan sudah 90% terbangun, namun tinggal melakukan perbaikan atau peningkatan jalan lingkungan untuk infrastruktur yang sudah dibangun kemudian rusak.

Pembangunan infrastruktur di Desa Telaga Murni dianggap sudah berjalan dengan cukup baik bagi masyarakat walaupun terdapat kendala dalam pendanaannya. Dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik karena sudah banyak terdapat jalan yang bagus di desa ini, bahkan untuk jalan sendiri setiap tahun selalu dilakukan pengecekan terhadap jalan dan aparatur desa siap memperbaiki apabila ditemukan kerusakan-kerusakan pada jalanan. Bukan hanya itu, gedung fasilitas pelayanan sosial juga cukup bagus dan nyaman. Bahkan kedepannya di desa Telaga Murni akan dibangun gedung serba guna yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Pengawasan dilakukan berdasarkan rencana pembangunan yang digunakan untuk mengetahui tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam rencana pembangunan. Pengawasan dilakukan oleh oleh BPD melalui usulan-usulan misalnya terdapat ukuran dalam pembangunan yang kurang, campuran bahan dalam proses pembangunan yang kurang sehingga bisa segera diperbaiki. Pengawasan berfungsi untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik. Pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila tata cara pengawasan dilakukan sesuai dengan wewenang dan tugasnya untuk meninjau realisasi penyerapan dana dalam pelaksanaan pembangunan. Pihak kecamatan juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang

dilakukan sebagai proses atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk menjamin supaya penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Integrasi Yang Dilakukan Organisasi Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Telaga Murni

Integrasi dapat dikatakan sebagai proses yang menyangkut mengenai hubungan suatu organisasi tertentu dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sosialisasi merupakan hal yang paling utama dalam pelaksanaan dan pengembangan suatu organisasi, sehingga dengan adanya sosialisasi yang baik akan menimbulkan komunikasi yang baik juga. Di Desa Telaga Murni, apabila terdapat perencanaan pembangunan infrastruktur pihak pemerintah desa akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam rangka pemberian informasi untuk memusyawarahkan rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Sosialisasi di desa ini dilakukan melalui rapat mingguan secara rutin yang diimbau melalui RT, RW agar masyarakat ikut berpartisipasi. Rapat dilakukan setiap hari selasa di Kabupaten, hari rabu di Kecamatan dan dari Kecamatan informasi tersebut dibawa ke desa, jadi setiap hari kamis diadakan rapat mingguan di desa. Dalam rapat mingguan Desa yang terlibat yaitu ibu-ibu PKH, RT, RW, Kepala dusun, masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menggosialisasikan semua program desa. Sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan cara membuat spanduk berupa himbauan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan sebagai cara agar masyarakat sadar untuk membuang sampah pada tempatnya.

Komunikasi yang terjalin antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat dapat dikatakan berjalan dengan baik akibat dari adanya musyawarah yang selalu dilakukan setiap minggu. Dalam pembangunan infrastruktur di desa ini terdapat keterlibatan dari masyarakat. Mereka ikut membantu apabila dana dalam pelaksanaan pembangunan kurang, yaitu dengan membantu tenaga dan mengadakan kerja bakti. Seperti dalam pembuatan saluran air, hanya pekerja yang dibayar sisanya masyarakat membantu tenaga. Di desa ini juga terdapat Jumsih (Jum'at Bersih) yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan lingkungan terutama saluran air.

Adaptasi Yang Dilakukan Organisasi Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Telaga Murni

Adaptasi dalam program pembangunan infrastruktur desa dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkretnya yaitu tersedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat. Pemerintah Desa Telaga Murni melakukan adaptasi terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar dengan mengambil tindakan, mempelajari permasalahan yang terjadi, kemudian mengatasi permasalahan yang terjadi apabila penyebabnya sudah ditemukan. Seperti melakukan kerja bakti untuk mengeruk kali ataupun saluran air, agar permasalahan banjir dapat teratasi. Akses prasarana bagi masyarakat dapat dikatakan sudah cukup memadai serta dapat menunjang setiap kebutuhan masyarakatnya mulai dari adanya gedung balai desa, gedung BPD, dan disediakannya buku-buku untuk dibaca oleh masyarakat pada saat menunggu dalam proses pelayanan publik.

Proses pelaksanaan musrembang di desa ini dilakukan dengan mengirim aspirasi dari masyarakat, tidak semua masyarakat mengikuti musrembang tetapi hanya orang-orang tertentu yang memiliki kepekaan. Biasanya RT mengadakan rapat dengan masyarakat apa saja yang diperlukan, kemudian dibawa ke rapat RW, dari RW dibawa ke dusun, setelah itu dibawa ke desa. Setelah dibawa ke desa, dilihat dulu skala prioritasnya, karena dana yang dimiliki terbatas. Kebutuhan yang dibutuhkan disimpulkan oleh RT kemudian di ACC oleh RW, kepala dusun, dan dibawa ke desa. Apabila wilayah tersebut sudah banyak dilakukan pembangunan tetapi desa lain masih sedikit melakukan pembangunan, maka pengajuan tersebut tidak akan di ACC. Proses yang dilakukan untuk menentukan tolak ukur pengadaan dan pengisian tenaga kerja dalam pembangunan dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ada seperti membangun sebuah turap akan diperkirakan terlebih dahulu bahwa jumlah tukang yang diperlukan berapa orang, material yang diperlukan juga berapa hal tersebut dilakukan karena sudah ada standar yang ditentukannya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan efektivitas organisasi desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Telaga Murni dilakukan dengan tiga indikator efektivitas, sebagai berikut: 1) Dalam aspek pencapaian tujuan untuk melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Telaga Murni, dilakukan musyawarah yang berawal dari tingkatan paling bawah seperti

Musdus, Musdes, Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, dan yang terakhir Musrenbang Kabupaten. Pelaksanaan pembangunan melibatkan seluruh pemegang kepentingan desa yaitu masyarakat, RT, RW, semua aparatur pemerintah, karang taruna, BKK dan BPD. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan diukur berdasarkan pencapaian target dari perencanaan pembangunan dan dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan pengawasan oleh BPD untuk mengetahui sasaran serta tujuan dari pembangunan. 2) Dalam aspek integrasi pada pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Telaga Murni, dilakukan sosialisasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam rangka pemberian informasi untuk memusatwarahkan rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui rapat mingguan secara rutin yang diimbau melalui RT, RW agar masyarakat ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah membuat komunikasi yang terjalin antara pihak pemerintah dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. 3) Dalam aspek adaptasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Desa Telaga Murni melakukan adaptasi terhadap permasalahan yang ada di sekitar dengan mengambil tindakan, mempelajari permasalahan yang terjadi, dan mengatasi permasalahan apabila penyebabnya sudah ditemukan. Selain itu, sarana prasarana di desa ini sudah dapat menunjang kebutuhan masyarakat dengan adanya balai desa, gedung BPD, dan disediakannya sarana untuk masyarakat membaca apabila sedang menunggu hasil dari pelayanan publik di desa.

SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran terkait efektifitas organisasi desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Telaga Murni, sebagai berikut: 1) Dalam aspek pencapaian tujuan, pemerintah desa Telaga Murni telah melakukan musyawarah dengan baik dalam perencanaan pembangunan. Namun, selain untuk mencapai tujuan pembangunan alangkah lebih baiknya pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang tersedia bukan hanya melalui musyawarah saja. 2) Dalam aspek integrasi, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa telah dilakukan dengan baik. Namun, alangkah lebih baiknya apabila pihak RT memberikan surat edaran apabila akan dilaksanakan sosialisasi oleh pemerintah desa melalui rapat mingguan agar semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi. 3) Dalam aspek adaptasi, pemerintah desa telah melakukan adaptasi terhadap permasalahan disekitar dan sudah mampu untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Namun, alangkah lebih baiknya apabila pihak desa memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan musrembang dan berani memberikan aspirasinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-nya maka penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, dosen yang telah membimbing penulis yaitu: Ibu Kariena Febriantin, S.I.P., M.I.Pol, dan Bapak Rahman, M.Pd, serta semua pihak yang mendukung dan terlibat dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., Studi, P., Syariah, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Studi Pada Desa Latawaro Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara).
- Darmawansyah, R. (2017). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(3), 138-149.
- Ferdian, A., & Reski, K. (2020). Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal, 3(2), 45–52.
- HAW. Widjaja (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rosita, A. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Bone. Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April, 5–24.
- Rumegang, G., Kawoan, J. E., & Sumampouw, I. (2021). Efektivitas Musrembang Dalam

- Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. Governance, 1(2), 1–11.
- Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(3), 10483–10495. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3472>
- Silvianis, R., & Riau, U. (2015). Efektivitas Organisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2013. Jom FISIP, 2, 1–14.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Yusuf, M. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Kencana, 1999(December), 1–6.